

***ANALYSIS OF THE EFFECT OF GOVERNMENT WITH ALGORITHMS AND  
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) ON TAXPAYER COMPLIANCE AT THE  
JAKARTA MAMPANG PRATAMA TAX OFFICE***

***ANALISIS PENGARUH PEMERINTAHAN DENGAN ALGORITMA DAN  
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PADA KPP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN***

**Akbari Adha<sup>1</sup>, Rulinawaty<sup>2</sup>, Faizal Madya<sup>3</sup>**

Universitas Terbuka, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

[akbariadhautmap@gmail.com](mailto:akbariadhautmap@gmail.com)<sup>1</sup>, [ruly@ecampus.ut.ac.id](mailto:ruly@ecampus.ut.ac.id)<sup>2</sup>, [faizal@ecampus.ut.ac.id](mailto:faizal@ecampus.ut.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the influence of governance using algorithms and artificial intelligence (AI) on taxpayer compliance at the KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. The results of the study indicate that there is a significant influence between governance using algorithms and artificial intelligence on taxpayer compliance. For the variable of governance using algorithms (X1), the t-value is 5.294 with a significance level of 0.000, which is less than the 5% confidence level. The t-value (5.294) is greater than the t-table value (1.971). This causes the alternative hypothesis (Ha) to be accepted and the null hypothesis (H0) to be rejected, leading to the conclusion that there is a significant influence of governance using algorithms on taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Furthermore, for the artificial intelligence variable (X2), the t-value is 5.892 with a significance level of 0.000, which is less than the 5% confidence level. The t-value (5.892) is also greater than the t-table value (1.971). This causes the alternative hypothesis (Ha) to be accepted and the null hypothesis (H0) to be rejected, leading to the conclusion that there is a significant influence of artificial intelligence on taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. The results of the determination test show that governance using algorithms and artificial intelligence can explain taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan with an Adjusted R square value of 0.753, meaning 75.30%, while the remaining 24.70% is influenced by other factors.*

**Keywords:** Government with Algorithms and Artificial Intelligence (Ai) on Taxpayer Compliance, Kpp Pratama Jakarta

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemerintahan dengan algoritma dan artificial intelligence (AI) terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemerintahan dengan algoritma dan artificial intelligence terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada variabel pemerintahan dengan algoritma (X1), nilai t-hitung adalah 5.294 dengan tingkat signifikansi 0.000, yang lebih kecil dari tingkat keyakinan 5%. Nilai t-hitung (5.294) ini lebih besar dari t-tabel (1,971). Hal ini menyebabkan hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemerintahan dengan algoritma terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Selanjutnya, pada variabel artificial intelligence (X2), nilai t-hitung adalah 5.892 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang lebih besar dari tingkat keyakinan 5%. Nilai t-hitung (5.892) ini juga lebih besar dari t-tabel (1,971). Hal ini menyebabkan hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara artificial intelligence terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Hasil uji determinasi Pemerintahan Dengan Algoritma dan Artificial Intelligence dapat menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan sebesar Adjusted R square adalah 0,753 yang artinya 75,30%, sedangkan sisanya 41,50% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

**Kata Kunci:** Pemerintahan Dengan Algoritma Dan Artificial Intelligence (Ai) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kpp Pratama Jakarta.

## PENDAHULUAN

Pajak adalah pilar penting bagi ekonomi dan pembangunan suatu negara. Pajak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara (Akbulaev 2024) (Menescal & Alves 2024). Pajak juga memberikan dukungan vital untuk pembangunan berkelanjutan (Dradra 2024). Sayangnya, tidak semua negara berhasil dalam mengumpulkan pajak dengan baik. Salah satu pemicu adalah kepatuhan wajib pajak.

Algoritma dapat dibandingkan dengan petunjuk langkah demi langkah dalam banyak aspek, dimana organisasi, baik swasta maupun publik, saat ini menggunakan algoritma untuk membuat keputusan yang lebih efisien, cepat, dan akurat. Ada dua jenis utama algoritma yang perlu dibedakan. Pertama, algoritma berbasis aturan, yang dirancang oleh manusia seperti resep digital, menetapkan langkah-langkah spesifik untuk mencapai hasil tertentu. Kedua, algoritma pembelajaran, seperti yang dijelaskan oleh Lorenz et al. (2020), yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan belajar secara mandiri dari data yang diolahnya.

Saat ini pemerintahan dengan algoritma dan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI/ kecerdasan buatan) telah menjadi tren yang berkembang pesat dalam berbagai sektor, termasuk pelayanan publik di bidang perpajakan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami pengaruh dari pemerintahan dengan algoritma, AI, terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Zaid Aljodat, Vishanth Weerakkody, Ramzi El-Haddadeh.,2021).

Kehadiran algoritma dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) telah secara signifikan merubah cara pemerintah mengelola kepatuhan perpajakan. Teknologi ini memungkinkan analisis mendalam terhadap data perpajakan, memudahkan

deteksi pola-pola yang menunjukkan penghindaran atau pelanggaran perpajakan. Dengan cara ini, pemerintah bisa lebih mudah mengidentifikasi kelompok atau individu yang berpotensi memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Hasilnya, sumber daya dapat diarahkan dan digunakan secara lebih efisien untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan pajak (Lara Saldivar-Tanaka, Jennifer Shkabatur., 2019).

Algoritma dan kecerdasan buatan (AI) membuat prosesnya lebih mudah dan lebih cepat bagi wajib pajak. Dengan otomatisasi dan penggunaan chatbot, wajib pajak dapat dengan cepat mendapatkan informasi akurat tentang kewajiban pajak mereka. Selain itu, sistem ini bisa memberikan saran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap wajib pajak, membantu mereka memahami berbagai insentif dan konsekuensi terkait dengan kepatuhan atau pelanggaran perpajakan (Adegboyega Ojo, Tomasz Janowski.,2018).

Dalam penerapan teknologi seperti algoritma, kecerdasan buatan (AI), dan sistem perpajakan digital, sangat penting untuk memperhatikan privasi dan keamanan data. Ketika mengumpulkan dan mengolah data perpajakan, pemerintah perlu menjamin bahwa data pribadi wajib pajak dilindungi secara memadai dan selaras dengan peraturan yang berlaku. Kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data mereka adalah kunci untuk mendapatkan dukungan dan kerjasama dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Memastikan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik tetapi juga meningkatkan efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan (Jenna Sweeting, Michael Mintrom.,2020).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Mampang Prapatan

merupakan salah satu unit administrasi pajak di wilayah Jakarta Selatan. Di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dapat dilaksanakan secara online. Untuk melihat jumlah wajib pajak serta setoran wajib pajak KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan terlihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1. Jumlah WP Terdaftar, Jumlah WP Wajib SPT, Jumlah WP Melakukan Pelaporan dan WP melakukan pembayaran pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan Tahun 2018-2022**

No	Jenis Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar					Jumlah Wajib Pajak Wajib SPT					Jumlah Wajib Pajak Yang Melakukan Pelaporan					Jumlah Wajib Pajak Yang Melakukan Pembayaran				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Badan	10.374	11.053	11.845	12.635	13.711	2.469	2.788	3.217	3.676	3.824	2.645	2.862	3.086	3.291	2.970	1.988	2.117	2.186	2.299	2.447
2	OP	73.156	76.749	80.487	86.156	90.606	16.885	17.861	19.286	20.882	21.062	18.671	1.764	20.632	21.314	20.072	2.381	2.918	2.639	2.026	2.042
3	Bendahara	273	274	274	324	324	273	274	274	324	324	70	70	100	47	27	27	70	100	47	27
	Jumlah	83.804	88.076	92.606	99.115	104.641	19.354	20.649	22.503	24.558	24.886	21.316	20.502	23.708	24.605	23.042	4.439	5.085	4.925	4.372	4.516

Sumber : KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, 2023

Dari data yang disajikan di tabel 1. terlihat bahwa jumlah wajib pajak meningkat setiap tahun, yang secara teoritis merupakan kabar baik untuk Direktorat Jenderal Pajak karena berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Namun, kenyataannya, peningkatan jumlah wajib pajak ini tidak diikuti oleh peningkatan dalam persentase wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), persentase pelaporan pajak, maupun persentase penerimaan pembayaran pajak. Faktanya, selama lima tahun terakhir, dari tahun 2018 hingga 2022, terdapat penurunan dalam persentase pelaporan dan pembayaran pajak dari wajib pajak badan, individu, dan bendahara. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kepatuhan wajib pajak, yang menjadi tantangan bagi pihak berwenang dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, sangat penting bagi pemerintah

untuk mengintegrasikan penggunaan algoritma, kecerdasan buatan (AI) yang efisien. Algoritma dan AI menyediakan analisis data yang mendalam, membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah kepatuhan. Sinergi antara teknologi canggih ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi wajib pajak untuk patuh, sekaligus menjaga keandalan sistem perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, berdasarkan fenomena gap yang telah dikemukakan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak tidak diikuti oleh peningkatan dalam persentase wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menjadi dasar penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, yaitu kepatuhan wajib pajak yang turun naik, pelayanan yang kurang optimal, sistem administrasi perpajakan yang kurang maksimal dan kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Pemerintahan Dengan Algoritma Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan?
2. Apakah terdapat pengaruh *Artificial Intelligence* (AI) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan?
3. Apakah terdapat pengaruh Pengaruh Pemerintahan Dengan Algoritma dan *Artificial Intelligence* (AI) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan?

## TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengaruh Pemerintahan Dengan Algoritma Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Artificial Intelligence* (AI) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.
  3. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Pemerintahan Dengan Algoritma dan *Artificial Intelligence* (AI) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pemerintah dengan Algoritma

Algoritma pemerintah adalah konsep yang memanfaatkan kekuatan algoritma, perhitungan komputasi, pengambilan keputusan otomatis, dan pembelajaran mesin yang memiliki potensi besar untuk menilai, mengatur, dan mengelola perilaku baik agen manusia maupun non-manusia dalam berbagai konteks (Gritsenko & Wood 2022). Ini adalah alat yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek masyarakat, mulai dari layanan publik hingga praktik tenaga kerja dan moderasi konten, dan mencakup berbagai praktik sosial-teknis yang membentuk tatanan sosial melalui penerapan sistem algoritmik (Katzenbach & Ulbricht 2019).

Algoritma pemerintah juga terkait dengan penggunaan algoritma dalam proses pemerintahan untuk membuat keputusan, menerapkan kebijakan, dan mengoordinasikan interaksi sosial. Ini melibatkan penerapan sistem algoritmik untuk mengarahkan proses pemerintahan yang berpotensi menggeser hubungan kekuasaan dan mengubah hasil distribusi dalam proses tersebut (Gritsenko & Wood 2022). Ini juga menggambarkan penggunaan algoritma, terutama dalam konteks kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, untuk

mengotomatisasi proses pengambilan keputusan dalam berbagai aspek masyarakat (Srivastava 2023).

Algoritma pemerintah, meskipun terstruktur untuk melayani kepentingan mereka yang saat ini berkuasa, juga menekankan tanggung jawab dan akuntabilitas algoritmik. Modal yang dibutuhkan untuk membangun AI dalam skala besar menyiratkan bahwa pemerintah algoritma terstruktur untuk menguntungkan kepentingan dominan saat ini (Crawford 2021). Namun, tantangan yang dihadapkannya, seperti tanggung jawab dan akuntabilitas algoritmik, sedang diatasi melalui pendekatan seperti *co-design*, memastikan bahwa algoritma dikembangkan dan digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan (Dekker et al. 2022).

### Indikator Pemerintah dengan algoritma

Wierzynski (2018) menyatakan bahwa pemerintah dengan algoritma berasal dari *explainability* yang berfokus pada:

- a) Transparansi, di mana manusia memiliki hak untuk memiliki keputusan yang memengaruhi mereka dijelaskan kepada mereka dalam istilah, format, dan bahasa yang dapat mereka pahami,
- b) Kausalitas, di mana AI dapat memberikan penjelasan baik berupa kesimpulan maupun fenomena yang mendasarinya,
- c) Bias, untuk mencegah AI dari pembelajaran pandangan yang bias karena kurangnya data latih atau fungsi tujuan,
- d) *Fairness*, dimana keputusan dibuat oleh sistem AI harus dipastikan adil, dan
- e) *Safety*, dimana manusia harus mendapatkan kepercayaan dan

keandalan dari sistem AI.

### ***Artificial Intelligence (AI)***

Secara konseptual, AI adalah bidang ilmiah dan terapan yang berfokus pada pengembangan sistem teknologi dan perangkat lunak yang meniru fungsi kognitif manusia. Sistem ini, yang dikenal sebagai kembar digital kecerdasan manusia, dirancang untuk belajar, beradaptasi, dan berkembang secara mandiri berdasarkan kriteria preferensi. Mereka bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fungsional mereka melalui pengambilan keputusan berkualitas dan mengadopsi solusi kreatif dan inovatif berteknologi tinggi. Untuk ini, peta jalan strategis sedang dibuat (Bryndin 2020).

Menurut Madya et al (2022) AI sangat penting saat mempertimbangkan kekuatan vital dalam organisasi melawan perubahan dan ancaman bahwa AI dapat menggantikan banyak pekerjaan yang saat ini dipegang oleh karyawan. Dengan demikian, manajer harus mengembangkan hubungan kerja yang baik antara karyawan teknis dan staf fungsi lini untuk meminimalkan gesekan dan potensi kekuatan inersia, menunda adopsi AI, dan menghambat bidang nilai bisnis.

AI juga digambarkan sebagai disiplin yang sedang berkembang yang bertujuan untuk meniru dan memperluas kecerdasan manusia, membangun serangkaian metodologi penelitian, prinsip ilmiah, dan aplikasi yang berguna. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri dalam mesin atau sistem cerdas, serta pengenalan gambar dan suara, interaksi manusia-komputer, dan permainan manusia-komputer (Hou & Xu 2021). AI berfokus pada pengembangan aplikasi dan algoritma cerdas yang membantu dalam membuat keputusan yang tepat (Mijwil et al. 2022). Hermawan (2022) mengklaim

bahwa transformasi digital sebagai bagian dari AI mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Madya et al. (2022) juga membuktikan bahwa AI meningkatkan kepatuhan dalam pelayanan publik.

### ***Indikator Artificial Intelligence***

Menurut Supriyadi (2020) dimensi dari *Artificial Intelligence* adalah:

- a) Kegunaan (*usefulness Perceived*)
  - Meningkatkan kualitas pekerjaan.
  - Kontrol lebih besar atas pekerjaan.
  - Menyelesaikan tugas lebih cepat.
  - Mendukung aspek pekerjaan.
  - Meningkatkan efektivitas pekerjaan.
  - Membuat pekerjaan lebih mudah.
- b) Kemudahan (*Ease of Use Perceived*)
  - *Artificial intelligence Personal Assistant* mudah dioperasikan.
  - Penggunaan *artificial intelligence Personal Assistant* jelas dan dapat dimengerti.

### ***Kepatuhan Wajib Pajak***

Kepatuhan perpajakan adalah kesediaan wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan, melaporkan pendapatan mereka dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu (Tilahun 2019). Ini juga mengacu pada sejauh mana individu dan bisnis mengikuti undang-undang dan peraturan perpajakan dengan melaporkan pendapatan, pengurangan, dan detail terkait lainnya dengan benar serta membayar pajak yang mereka miliki kepada pemerintah (Alkhatib et al. 2020). Kepatuhan perpajakan melibatkan pelaporan semua pendapatan dengan benar dan membayar semua pajak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan (Alshira'h & Abdul-Jabbar 2020). Ada

tiga jenis kepatuhan yang diakui: kepatuhan komited di mana wajib pajak secara sukarela dan sepenuhnya mematuhi undang-undang pajak; kepatuhan kapitulatif di mana wajib pajak mematuhi karena takut akan hukuman; dan kepatuhan inovatif di mana wajib pajak menemukan cara kreatif untuk mematuhi undang-undang pajak. Kepatuhan juga dapat dipaksakan atau ditolak (Alshira'h & Abdul-Jabbar 2020).

Kepatuhan perpajakan adalah tantangan yang terus-menerus bagi pembuat kebijakan di seluruh dunia dan merupakan aspek penting dari tata kelola keuangan. Pajak, sebagai sumber keuangan utama bagi pemerintah untuk mendanai pengeluaran publik, telah menjadi bagian dari masyarakat manusia sejak awal. Sepanjang sejarah, individu terus mencari cara untuk menghindari atau menghindari membayar pajak. Akibatnya, kepatuhan pajak tetap menjadi topik utama dalam literatur perpajakan (Twesige et al. 2024). Berbagai tindakan termasuk dalam lingkup kepatuhan pajak, seperti mengajukan pajak tepat waktu, membayar pajak, dan melaporkan pajak, serta mendaftar untuk pajak dengan segera, menjaga catatan akuntansi yang akurat, dan memberikan informasi yang diperlukan untuk membantu audit pajak.

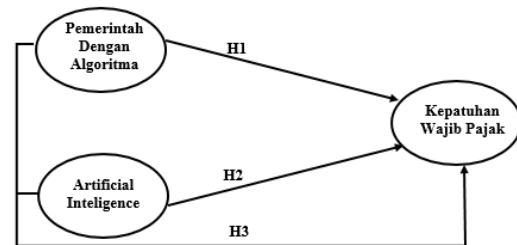
### Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Muliari dan Setiawan (2016) indikator dari kepatuhan wajib pajak terdiri dari:

- Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
- Memenuhi kewajiban pajak;
- Tidak mempunyai tunggakan pajak;
- Membayar pajak tepat waktu;
- Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan penggelapan pajak.

## KERANGKA PENELITIAN

Pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan yang meliputi peraturan perundang-undangan dari tahap perumusan hingga pembuatannya serta penyempurnaan administrasi perpajakan sehingga memudahkan wajib pajak dari segi pelayanan. Adapun kerangka penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Krangka Penelitian

### Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Terdapat pengaruh secara parsial Pemerintahan Dengan Algoritma terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2: Terdapat pengaruh secara parsial *Artificial Intelligence* (AI) terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H3: Terdapat pengaruh secara simultan Pemerintahan Dengan Algoritma dan *Artificial Intelligence* (AI) terhadap kepatuhan wajib pajak.

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu untuk menjelaskan suatu situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi kepustakaan sehingga lebih memperkuat analisa peneliti dalam membuat suatu kesimpulan, dimana hasil penelitian diperoleh dari hasil perhitungan indikator-indikator variable penelitian kemudian dipaparkan secara tertulis oleh penulis.

### SPopulasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi dengan kriteria wajib pajak patuh yang melakukan pelaporan dan pembayaran pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan pada tahun 2022 yang berjumlah 2.042 orang. Besar sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin. Untuk lebih jelasnya ditentukan dengan menggunakan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Nilai Error

Berdasarkan rumus tersebut diatas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah :

$$n = \frac{2.402}{1 + 2.402(0,05)^2}$$

$$n = \frac{2.402}{1 + 5,105}$$

$$n = \frac{2.402}{6,105}$$

$$n = 393,44 = 393 \text{ Orang}$$

Untuk memudahkan penelitian maka perhitungan sampel dibulatkan menjadi 393 orang wajib pajak.

### Prosedur Pengumpulan Data

Daftar pertanyaan (*quistionaire*) yaitu dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian kepada seluruh pegawai yang ada di Direktorat Jendral Pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### Deskripsi Penelitian

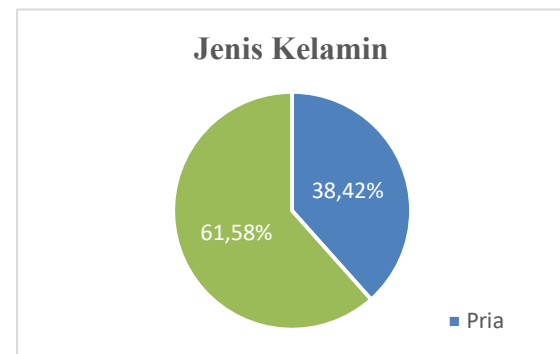
Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan sebanyak 334 orang, Untuk

melihat identitas responden dalam penelitian ini yang meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, lama menjadi wajib pajak dapat dilihat pada uraian berikut:

### Responden Berdasarkan Jenis

#### Kelamin

Responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 2. berikut ini:



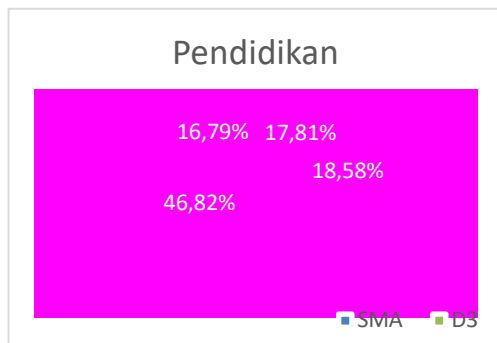
**Gambar 2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Dari Gambar 2. terlihat bahwa responden laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan responden perempuan. Hal tersebut dapat dianalisa bahwa pegawai laki-laki mempunyai kompetensi sumber daya lebih tinggi. Hal ini dikarenakan jumlah laki-laki lebih cepat dan lebih banyak ditugaskan dilapangan dalam menghadapi pekerjaannya untuk itu lebih memberikan kontribusi yang besar dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab apabila terjadi masalah seperti terjadinya gangguan dari luar dalam pelaksanaan tugas, serta keluhan wajib pajak, selain itu karena pekerjaan yang dihadapi adalah sesuai dengan bidangnya.

### Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3. berikut ini :



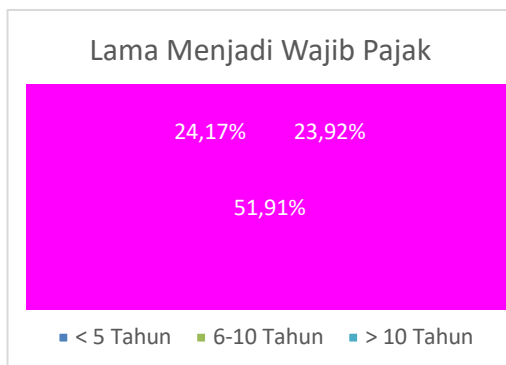


**Gambar 3. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Dari Tabel 3. dapat dianalisa bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, diperoleh temuan responden yang memiliki kompetensi sumber daya tertinggi adalah S1. Kesesuaian pekerjaan yang dimiliki seseorang erat kaitannya dengan tingkat pendidikan yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa persentase tertinggi berada pada tingkat pendidikan S1. Tingkat pendidikan pada tingkat ini telah dapat dipercaya dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan sebagai pelaksana dilapangan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing dan telah memiliki pengetahuan yang baik.

#### Responden Berdasarkan Lama menjadi wajib pajak

Responden berdasarkan lama menjadi wajib pajak dapat dilihat pada Gambar 4. berikut ini:



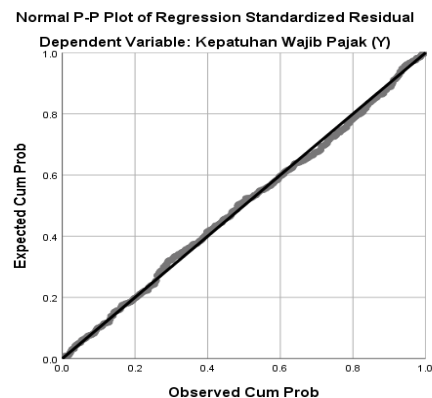
**Gambar 4. Responden Berdasarkan Lama menjadi wajib pajak**

Dari Tabel 4. dapat dianalisa bahwa berdasarkan lama menjadi wajib

pajak, diperoleh temuan rata-rata responden telah menjadi wajib pajak selama 6-10 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan memiliki pengalaman sehingga dengan Kepatuhan Wajib Pajak sudah semakin baik, karena semakin lama seorang telah menjadi Wajib Pajak orang pribadi tentu akan sedikit banyak akan mendapatkan pengetahuan atau pengalaman menjadi wajib pajak.

#### Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013:160). Dari hasil pengolahan data dapat diketahui normal probability plot dalam penelitian ini :



**Gambar 5. Uji Normalitas Data**

Dari gambar normal probability plot dapat diketahui dalam pengolahan data yang dimasukkan, semua data mendekati garis lurus. Artinya data dalam penelitian ini normal.

#### Persamaan Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS for windows versi 25.0 diperoleh koefisien-koefisien pada persamaan regresi linear berganda sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Variabel Independen	Kepatuhan Wajib Pajak		
	Unstandardized Coefficients Beta	Std. Error	Standardized Coefficients Beta
Konstanta	1.492	0.366	
Pemerintahan Dengan Algoritma	0.291	0.053	0.262
Artificial Intelligence	0.366	0.067	0.289

Sumber: Olahan Data, 2024

Berdasarkan Tabel 2. diatas maka dapat diketahui bahwa persamaan regresi linear berganda dalam analisis ini adalah :

$$Y = 1,492 + 0,291 X_1 + 0,366 X_2$$

Arti persamaan regresi linear tersebut adalah :

- Nilai  $a = 1,492$  menunjukkan bahwa apabila Pemerintahan Dengan Algoritma ( $X_1$ ), Artificial Intelligence ( $X_2$ ) konstan atau tetap maka Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan akan mengalami peningkatan sebesar 1,492.
- Nilai  $b_1 = 0,291$  menunjukkan bahwa apabila nilai Pemerintahan Dengan Algoritma ( $X_1$ ) naik 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan akan mengalami peningkatan sebesar 0,291 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan.
- Nilai  $b_2 = 0,366$  menunjukkan bahwa apabila nilai variabel Artificial Intelligence ( $X_2$ ) naik 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan akan mengalami peningkatan sebesar 0,366 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan.

#### Uji t (Pengaruh Partial)

**Tabel 3. Analisis Regresi Secara Parsial (Uji t)**

Variabel Independen	Kepatuhan Wajib Pajak		
	Beta	t	Sig
Konstanta	1.492		

Pemerintahan Dengan Algoritma	0.291	5.491	0.000
Artificial Intelligence	0.366	5.463	0.000

Sumber: *Data Olahan SPSS 2024*

Berikut ini dapat diuraikan mengenai hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini :

#### a) Pengaruh Pemerintahan Dengan Algoritma Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada variabel Pemerintahan Dengan Algoritma ( $X_1$ ) nilai t-hitung yaitu 5.294 dengan taraf signifikansi 0.000 lebih kecil daripada tingkat keyakinan 5 %. Nilai ini t-hitung (5.294) ini lebih besar daripada t-tabel (1,971). Hal ini menyebabkan  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan antara Pemerintahan Dengan Algoritma ( $X_1$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

#### b) Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada variabel Artificial Intelligence ( $X_2$ ) nilai t-hitung yaitu 5,892 dengan taraf signifikansi 0,000 lebih besar daripada tingkat keyakinan 5 %. Nilai ini t-hitung (5,892) ini lebih besar daripada t-tabel (1,971). Hal ini menyebabkan  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan antara Artificial Intelligence ( $X_2$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

#### Uji F (Pengaruh Simultan)

Uji secara bersama-sama (simultan) untuk mengetahui pengaruh variabel Pemerintahan Dengan Algoritma, Artificial Intelligence secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, berikut:

**Tabel 4. Uji Secara Simultan (Uji F)**

Variabel	F	Sig
Artificial Intelligence, Pemerintahan	103,480	0,000

Dengan  
Algoritma

### Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi berganda, disimbolkan  $R^2$  merupakan ukuran kesesuaian garis linear berganda terhadap suatu data. Nilai  $R$  atau  $R^2$  dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R Square	Adjusted R Square
1	0.772	0.774

Sumber: Olahan Data, 2024

Berdasarkan Tabel 5. diatas dapat diketahui bahwa besarnya *Adjusted R square* adalah 0,753 yang artinya 75,30% variabel bebas tersebut (Pemerintahan Dengan Algoritma / $X_1$ , Artificial Intelligence / $X_2$  dapat menjelaskan variabel independen yakni Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, sedangkan sisanya 41,50% dipengaruhi oleh faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan lainnya yang tidak diteliti.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Pemerintahan Dengan Algoritma, *Artificial Intelligence* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya bahwa peran Pemerintahan Dengan Algoritma, *Artificial Intelligence* menentukan Kepatuhan Wajib Pajak
2. Pemerintahan Dengan Algoritma berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peran Pemerintahan Dengan Algoritma sangat menentukan bagi Kepatuhan Wajib Pajak.
3. *Artificial Intelligence* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti *Artificial Intelligence* memiliki peran yang sangat penting terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, beberapa saran yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan kewajiban pajak sebagai berikut:

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan Kepatuhan Wajib Pajak, diperlukan suatu pendidikan dan Pelayanan Publik yang sifatnya mampu menimbulkan inovasi-inovasi yang dimiliki pegawai kantor pajak, yang kemudian nantinya akan disharing kesesaama rekan kerja sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Agar *Artificial Intelligence* berjalan sesuai dengan tujuan organisasi, hendaknya selalu mengingatkan kepada Wajib Pajak orang pribadi untuk selalu memanfaatkan dengan maksimal agar pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat.
3. Dalam hal Pelayanan Publik, pihak organisasi hendaknya menekankan kepada setiap pegawai untuk menjaga nilai-nilai kejujuran dalam bekerja dengan cara selalu melakukan kroscek pada saat pekerjaan sedang berlangsung tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya.
4. Untuk penelitian selanjutnya, agar memperluas cakupan penelitian serta menambahkan variabel yang mampu mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adegboyega Ojo, Tomasz Janowski (2018) "The Impact of Artificial Intelligence on Public Administration". *Journal: Transforming Government: People, Process and Policy*.
- Aji, Bagus Prabowo, 'Implementasi Big Data Analytics Berbasis Machine Learning Pada Industri Implementasi Big Data Analytics (

- BDA ) Berbasis Machine Learning Pada Industri Retail : A Literature Review', ResearchGate, January, 2019, 2–6.
- Ali S. 2020. Revolusi Industri 4.0 dan Dampaknya terhadap Pendidikan Akuntansi di Indonesia. Yogyakarta Badan Penerbit Fak Ekon.
- Bagus Prabowo Aji (2018), Implementasi Big Data Analytics Berbasis Machine Learning pada Industri Ritel: a literature review.
- Cahyani, (2022) Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimoderasi Dengan Teknologi.
- Dani, (2018) Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada 5 KPP di Kanwil DJP Jabar 1.
- Diamendia, Tia, and Milla S Setyowati, 'Analisis Kebijakan Compliance Risk Management Berbasis Machine Learning Pada Direktorat Jenderal Pajak', Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 6.3 (2021), 289–98 <<https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.401>.
- Faizal Madya, Rulinawaty, Pasaribu (2020) Government with Algorithm: Strategy to Improve Synchronous Public Service Using Artificial Intelligence (AI) in Indonesia.
- Fathani dan Apollo, (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama.
- Ferdinand, A. (2017). Structural Equation Modelling Dalam Penelitian Manajemen: Aplikasi Model-model Rumit Dalam Penelitian untuk Tesis Magister dan Disertasi Doktor. (Ed. 2). Universitas Dipenogoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2018). Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan. Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0. Universitas Dipenogoro.
- Gibson, J. L. Dkk. (2015). Organisasi dan Manajemen. Jakarta; Penerbit Erlangga.
- Goodman 8, Flaxman S (2017) European union regulations on algorithmic decision making and a "right to explanation." *AI Mag* 38:50-57. <https://doi.org/10.1609/aimag.v38i3.2741>.
- Gunadi. 2015. Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media. Indonesia.
- Hagras, H. K. Almohammadi, D. Alghazzawi, and G. Aldabbagh, (2018) "A survey of artificial intelligence techniques employed for adaptive educational systems within e-learning platforms," *J. Artif. Intell. Soft Comput. Res.*, vol. 7, no. 1, pp. 47–64, 2017, doi: 10.1515/jaiscr-2017-0004.
- Halida An Nabila, Primandita Fitriandi (2018) Implementasi Compliance Risk Management Sebagai Decision Support System Dalam Kegiatan Penagihan Di Direktorat Jenderal Pajak.
- Hamonangan Timbul, Simanjuntak dan Imam Mukhlis. 2012. Dimensi Ekonomi. Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Depok.
- Jenna Sweeting, Michael Mintrom (2020). "Artificial Intelligence in Government: Benefits and Risks". *Journal: Public Administration Review*
- Kasmir. (2017). Customer Service Excellent Teori dan Praktik.

- Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Keputusan Menteri Keuangan No.483/KMK.03/2020 tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- Kurnia, Siti Rahayu, 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Goralski, Margaret A., And Tay Keong Tan. —Artificial Intelligence And Sustainable Development. *The International Journal Of Management Education* 18, No. 1 (March 2020): 100330.
- Madya, Faizal. Rulinawaty dan Pasaribu, Daniel. (2022). Government with Algorithm: Strategy to Improve Synchronous Public Service Using Artificial Intelligence (AI) in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*. Volume 5, No 2, May 2022, Page: 14089-14100
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2016. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Volume 2.
- Nabila, Halida An, and Primandita Fitriandi, 'Implementasi Compliance Risk Management Sebagai Decision Support', *Implementasi Compliance Risk Management Sebagai Decision Support System Dalam Kegiatan Penagihan Di Direktorat Jenderal Pajak*, 2021, 67–82.
- Nasucha. Chaizi (2014). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*. Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nasution, S. (2017) 'Variabel penelitian', Raudhah.
- Nazarov, M. A., O. L. Mikhaleva, and K. S. Chernousova, 'Digital Transformation of Tax Administration', *Lecture Notes in Networks and Systems*, 84 (2020), 144–49  
<[https://doi.org/10.1007/978-3-030-27015-5\\_18](https://doi.org/10.1007/978-3-030-27015-5_18).
- Nilsson, J., N. (2009). *Artificial Intelligence A New Synthesis*. China: Morgan Kaufmana Publishe.
- Pangkey, F. M., Furkan, L. M., & Herman, L. E. (2019). Pengaruh Artificial Intelligence dan Digital Marketing terhadap Minat Beli Konsumen. *Jurnal Magister Manajemen Unram Vol*, 8(3)
- Prianto Budi Saptono, and Ismail Khozen, 'Rekonstruksi Pendekatan Compliance Risk Management Di Masa Pandemi Dalam Upaya Penguatan Penerimaan Pajak', *Scientax*, 3.1 (2021), 105–29  
<<https://doi.org/10.52869/st.v3i1.240>.
- Rahayu. Siti Kurnia 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung : Penerbit Rekayasa Sains.
- Rahman. Abdul, 2013. *Administrasi Perpajakan*. Bandung : Nuansa.
- Riduwan, dan Engkos Achmad Kuncoro. 2017. *Cara Menggunakan dan Memakai. Path Analysis (Analisis Jalur)*. Bandung : Alfabeta.
- Rosdiana Haula dan Edi Slamet Irianto. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saefudin dan Rahmawati (2020), *Digitalisasi Administrasi Perpajakan: Implementasi di KPP Pratama Semarang Selatan*.
- Sousa, W. G. de, Melo, E. R. P. de, Bermejo, P. H. D. S., Farias, R. A. S., & Gomes, A. O. (2019). How

- and where is artificial intelligence in the public sector going? A literature review and research agenda. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101392. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.07.004>.
- Sudjana. 2016. *Metode Statistika*. Bandung: PT. Tarsido Bandung.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Sukada, I Wayan, 'Implementasi Compliance Risk Management (CRM) Dalam Rangka Eskstensifikasi', Prosiding Simposium Keuangan Negara, 2020, 876–91 <<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/591>.
- Supriyadi, (2020). Implementasi Artificial Intelligence (AI) Di Bidang Administrasi Publik Pada Era Revolusi Industri 4.0.
- Tanzi. 2012. A Retrospective Study on Tax Reform On 14. Industrialization Developed Countries. *Palgrave Macmillan Journals*, 25 (3), pp: 417-451.
- Tia Diamendia (2019) Analisis Kebijakan Compliance Risk Management Berbasis Machine Learning Pada Direktorat Jenderal Pajak.
- Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP 2007).
- Valin, J. (2018). Humans still needed: An analysis of skills and tools in public relations. Chartered Institute of Public Relations. [https://www.cipr.co.uk/sites/default/files/11497\\_CIPR\\_AlinPR\\_A4\\_v7.pdf](https://www.cipr.co.uk/sites/default/files/11497_CIPR_AlinPR_A4_v7.pdf).
- Vochozka, & V. V. Mantulenko (Eds.), (2020) *Digital Age: Chances, Challenges and Future* (Vol. 84, pp. 62–70). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-27015-5\\_8](https://doi.org/10.1007/978-3-030-27015-5_8).
- Wahid Sulaiman. (2014). *Analisis Regresi Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Wharton, S. Amy. (2012). *The Sociology Gender*. United Kingdom : John. Wiley & Sons Ltd
- Wirtz, Lovelock. Christopher dan Muller. Jochen. 2011. *Manajemen Pemasaran, Jasa Manusia, Teknologi, Strategi*. Edisi 7 Jilid 1 dan 2. Jakarta: Erlangga
- Yogaswara, R (2020) Artificial intelligence sebagai penggerak industri 4.0 dan tan- tangannya bagi sektor pemerintah dan swasta," *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, vol. 10, 2019.
- Coglianese, C. (2021) 'Algorithmic regulation: Machine learning as a governance tool', in M. Schuilenburg and R. Peeters (eds), *The Algorithmic Society: Technology, Power, and Knowledge*. London and New York: Rout- ledge. pp. 35–52.
- Lara Saldivar-Tanaka, Jennifer Shkabatur (2019) "Algorithmic Governance: Developing a Research Agenda through the Power of Platforms, Policies, and Procedures" (2019) *Journal: Public Administration Review*.
- Lorenz, L., Meijer, A. and Schuppan, T. (2020) 'The Algocracy as a new ideal type for gov- ernment organizations: Predictive policing in Berlin as an empirical case', *Information Polity*, pre-press, 1–

16.

- Bovens, M. and Zouridis, S. (2002) 'From street-level to system-level bureaucracies: How information and communication technology is transforming administrative discretion and constitutional control', *Public Administration Review*, 62 (2): 174–84.
- Zaid Aljodat, Vishanth Weerakkody, Ramzi El-Haddadeh (2021). The Rise of Algorithm-Driven Government: A Review of the Use of Algorithms in Public Sector Decision-Making. *Journal: Government Information Quarterly*.